



PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DASAR DI KOTA BANDUNG

Tiara Pebriyanti Andari¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandung masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penanggulangan gepeng melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan regulasi, pengawasan yang belum optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Soerjono Soekanto yang meliputi norma, konsep perilaku, dan perilaku individu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta didukung data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 belum berjalan secara optimal. Mayoritas gelandangan dan pengemis berasal dari luar Kota Bandung dan cenderung kembali mengemis meskipun telah mendapatkan pembinaan. Selain itu, pengawasan belum efektif akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bandung.

Kata kunci: Peran, Dinas Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Gelandangan dan Pengemis

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the local government policy of Purwakarta Regency regarding domestic wastewater management through the development of Communal Wastewater Treatment Plants (IPAL Komunal) in Purwakarta District. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. The grand theory used is George C. Edwards III's Policy Implementation Theory, which highlights four key variables: communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the policy has not been fully effective. In terms of communication, the dissemination of information to the community remains limited, resulting in low public understanding of the function and importance of communal wastewater treatment facilities. Regarding resources, the program faces constraints in technical personnel and supporting infrastructure. In the disposition

aspect, although local government commitment is evident, community participation in maintaining and utilizing the facilities remains insufficient. Meanwhile, the bureaucratic structure shows unclear division of roles among agencies, leading to weak coordination and delayed implementation. The study concludes that policy implementation effectiveness depends heavily on clear communication strategies, adequate resources, implementers' commitment, and a well-structured bureaucratic framework. Strengthening public outreach, increasing technical capacity, clarifying institutional roles, and enhancing continuous evaluation are needed to optimize domestic wastewater management in Purwakarta District.

Keywords: Policy Implementation, Domestic Wastewater, Communal Wastewater Treatment.

PENDAHULUAN

Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan bagian dari masalah kesejahteraan sosial yang hingga kini masih sulit dituntaskan, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Soetomo (2012), permasalahan sosial muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan sistem sosial dalam memenuhinya. Kota besar seperti Bandung memiliki daya tarik ekonomi dan sosial yang tinggi sehingga mendorong terjadinya arus urbanisasi, yang pada akhirnya memicu meningkatnya jumlah penduduk rentan, termasuk gelandangan dan pengemis.

Kota Bandung sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Jawa Barat menghadapi kompleksitas persoalan sosial akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Fahrudin (2014) menyatakan bahwa kemiskinan, keterbatasan keterampilan, serta lemahnya akses terhadap pelayanan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Kondisi tersebut mendorong individu memilih bertahan hidup di ruang publik melalui aktivitas mengemis atau menggelandang.

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Regulasi ini menegaskan peran Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk gelandangan dan

pengemis. Rehabilitasi sosial dasar dipahami sebagai upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan individu agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal (Kementerian Sosial RI, 2018).

Namun demikian, implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung masih menghadapi berbagai kendala. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya penegakan aturan menyebabkan program rehabilitasi sosial belum mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan meskipun telah mengikuti proses pembinaan.

Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto. Soekanto (2018) menjelaskan bahwa peran mencakup tiga aspek utama, yaitu norma yang melekat pada suatu kedudukan, konsep perilaku yang diharapkan dari pemegang peran, serta perilaku individu yang nyata dalam pelaksanaan peran tersebut. Dalam konteks ini, Dinas Sosial tidak hanya dituntut menjalankan tugas secara normatif, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk

memahami secara mendalam peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar, berdasarkan realitas empiris di lapangan. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan secara purposive kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dasar, yaitu pejabat Dinas Sosial Kota Bandung, khususnya pada bidang rehabilitasi sosial, serta pihak terkait lainnya. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi gelandangan dan pengemis serta pelaksanaan program di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan Dinas Sosial, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer agar analisis menjadi lebih komprehensif. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul. Tahapan ini mengacu pada model analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

PEMBAHASAN

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai magnet urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya maupun dari luar provinsi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang relatif pesat menciptakan

peluang kerja, namun pada saat yang sama juga memunculkan persoalan sosial akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Kota Bandung menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial. Menurut Soetomo (2012), urbanisasi yang tidak terkendali sering kali memicu munculnya kelompok rentan yang tidak mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi perkotaan, sehingga berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk gelandangan dan pengemis. Fenomena ini terlihat jelas di Kota Bandung, khususnya di kawasan pusat kota, persimpangan jalan utama, kawasan komersial, dan area wisata.

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal daerah, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa masuknya penduduk dari luar kota. Daya tarik ekonomi dan tingginya mobilitas sosial menjadikan Bandung sebagai tujuan utama bagi individu dari daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap lapangan kerja formal menyebabkan sebagian pendatang tidak mampu bertahan secara ekonomi dan memilih mengemis sebagai strategi bertahan hidup.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung bersifat struktural dan multidimensional. Menurut Fahrudin (2014), kemiskinan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, perumahan layak, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penanganan gepeng tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan kebijakan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program penanganan gelandangan dan pengemis, salah satunya melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar. Program ini dirancang untuk memulihkan fungsi sosial individu agar mampu kembali berperan secara wajar dalam kehidupan

bermasyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan gepeng masih terus muncul dan cenderung berulang, terutama karena lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penegakan regulasi.

Pembahasan ini menganalisis peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar dengan menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup dimensi norma, konsep perilaku, dan perilaku individu. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif, harapan peran, dan realisasi pelaksanaan di lapangan.

Dimensi norma berkaitan dengan seperangkat aturan, nilai, dan ketentuan formal yang melekat pada suatu kedudukan atau lembaga. Menurut Soekanto (2018), norma berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana suatu peran seharusnya dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, norma yang menjadi dasar peran Dinas Sosial adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Sosial, termasuk dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Secara normatif, Dinas Sosial memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pendataan, pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan norma tersebut belum berjalan secara optimal. Penegakan peraturan masih bersifat persuasif dan belum disertai sanksi yang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi gelandangan dan pengemis yang kembali melakukan aktivitas mengemis.

Selain itu, lemahnya koordinasi lintas daerah menyebabkan sebagian besar gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Bandung kembali masuk ke wilayah kota setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku sasaran kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh konsistensi dan ketegasan dalam penegakannya.

Dimensi konsep perilaku berkaitan dengan gambaran atau harapan mengenai bagaimana suatu peran seharusnya dijalankan oleh pemegang peran. Soekanto (2018) menjelaskan bahwa konsep perilaku mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap tindakan yang ideal dari suatu lembaga sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini, Dinas Sosial diharapkan mampu menjalankan peran secara komprehensif, tidak hanya melakukan penertiban sementara, tetapi juga menyediakan pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta fasilitasi akses kerja atau usaha. Program Rehabilitasi Sosial Dasar seharusnya menjadi sarana pemberdayaan agar gelandangan dan pengemis dapat hidup mandiri dan tidak kembali ke jalan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep perilaku tersebut belum sepenuhnya terwujud. Pembinaan yang dilakukan masih bersifat jangka pendek dan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pemberian makan dan tempat penampungan sementara. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi peran Dinas Sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan peran dan kapasitas kelembagaan. Sejalan dengan pandangan Dunn (2003), kebijakan sosial yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai cenderung menghasilkan implementasi yang tidak efektif dan berkelanjutan.

Dimensi perilaku individu mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat atau pelaksana kebijakan dalam menjalankan perannya. Menurut Soekanto (2018), perilaku individu mencerminkan sejauh mana pemegang peran mampu menerjemahkan norma dan konsep perilaku ke dalam praktik konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Dinas Sosial telah berupaya menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki, seperti melakukan razia terpadu, pendataan, serta pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut belum maksimal. Keterbatasan jumlah petugas lapangan menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga banyak gelandangan dan pengemis yang kembali beraktivitas di ruang publik.

Selain itu, perilaku sebagian gelandangan dan pengemis yang memilih kembali mengemis menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum mampu mengubah pola pikir dan perilaku sasaran secara signifikan. Hal ini memperkuat pendapat Fahrudin (2014) bahwa perubahan perilaku dalam rehabilitasi sosial membutuhkan proses jangka panjang, pendampingan intensif, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Dengan demikian, perilaku individu pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar peran Dinas Sosial dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku individu pelaksana belum optimal akibat berbagai keterbatasan. Jumlah petugas lapangan yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada efektivitas tindakan yang dilakukan. Razia dan pembinaan yang tidak diikuti dengan pengawasan berkelanjutan menyebabkan gelandangan dan pengemis kembali beraktivitas di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku individu pelaksana belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi. Perilaku individu tidak hanya dilihat dari aparat pelaksana, tetapi juga dari gelandangan dan pengemis sebagai sasaran kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis memilih kembali mengemis karena alasan ekonomi dan kemudahan memperoleh penghasilan dibandingkan bekerja di sektor informal lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Proses Norma/Aturan Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung belum efektif dikarenakan pada Dinas Sosial maupun Dinas terkait dalam penyampaian informasi mengenai Aturan, Wewenang, dan program yang dilaksanakan belum intens dan belum semua masyarakat mengetahui apalagi masyarakat yang kurang paham dengan media sosial dan tidak memiliki media elektronik. Walaupun begitu tetapi sudah melalui cara yang benar dan baik. Dalam Peran sebagai Konsep Perilaku Ketersediaan Sumber Daya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung yang dimiliki oleh Dinas Sosial terlihat masih minim sehingga sangat mempengaruhi akan belum sepenuhnya terlaksana terkait Peraturan Wali Kota Bandung No. 54 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Peran Sebagai Perilaku Individu pada Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung mulai dari sikap pelaksana maupun tingkat kepatuhan pelaksana sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari sudah adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Dinas Sosial tersebut untuk melaksanakan programnya masing-masing dalam mencapai tujuannya, terlebih jika komunikasi antara aparatur Dinas Sosial dengan aparatur yang terkait terjalin dengan baik sehingga masyarakat juga menyadari dan merasakan akan terlaksananya Penyelenggaraan dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bajari, Atwar. 2015. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Creswell, John. W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edy Sudarhono, Teori Peran (Konsep, Derivasidan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1994), hal. 3.
- Fahrudin. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soerjono Soekanto.2018. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dr. Rahmi Widyanti, M. (2019). Perilaku Organisasi (teori dan konsep jilid 1). Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
- Prof. Dr. J. Winardi, S. (2003). Teori Organiasasi Pengorganisasian. Jakarta: PT RajaGraflindo Persada, Jakarta.

Jurnal dan Artikel

- Asyhari, Farid. (2016). Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Atau Pmks (Studi Kasus Korban Narkotika/Napza). Paradigma. Volume 04 Nomor 03.
- Fadri, Zainal. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta. Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat islam, 10(1).
- Kuntari, Sri & Hikmawati, Eni. (2017). Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(1).
- M.Ramadhani, Sarbaini, Harpani Matnuh. 2016. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Padang." Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Vol-6.

- Prabawati, N. P. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gianyar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal JAPS.
- Salsabila, Qorina, DKK. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Tanjung Pinang. Jurnal JAPS Volume 03 Nomor 03.
- Tannia, Rachman Dian. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Surabaya. Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya. hal 662-672.
- Loberta, Nanta. (2014). Strategi Bertahan Hidup “Pengemis, Gelandangan, dan Gelandangan dan Pengemis” Di Perkotaan. Hal 20 Vol 1

Regulasi

Undang-Undang 1945 pasal 34 tentang hak-hak Pelayanan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2015, tentang kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan sosial